

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA TARAKAN**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa' Taala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 20232disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Bedasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021, melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Tarakan, Maret 2022

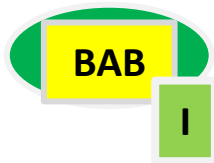
Kepala Dinas Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat



A R B A I N SE. M.A.P.  
NIP. 19680318 199403 1 007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI .....	III
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan....	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Kaltara.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan .. ..	20
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.</b>	
4.1 Program dan Kegiatan .....	22
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>28</b>



## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

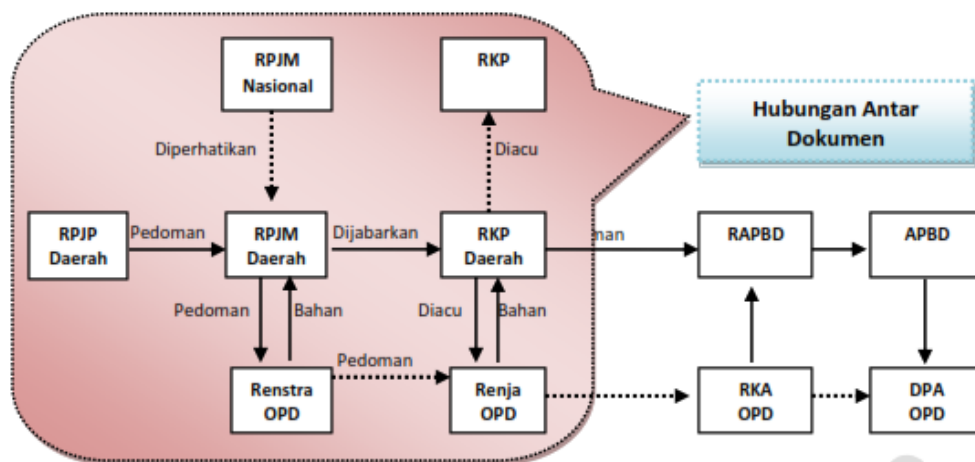
Renja merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih



Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;



23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai

tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Good Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2022 ;
2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu)

tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019–2024.
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2022;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2021.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun lalu dan capaian

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

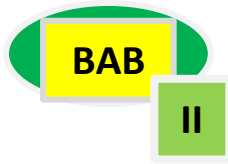
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Bab ini memuat Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2020), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 10 (Sepuluh) Program dan 25 (Dua puluh Lima) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.4.390.244.680,- dengan perincian Rp.3.242.310.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp.3.242.310.000,- atau 96,49% dan Rp.1.147.934.680,- untuk Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp.1.147.934.680,- atau sebesar 71,17%.

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2020	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tah2	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1.06 . 1.06.01. 01</b>	<b>Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran</b>									
1.06 . 1.06.01. 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
1.06 . 1.06.01. 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Pajak Kendaraannya Terbayarkan	45 unit	28 unit	14 unit	14 unit		17 unit	45 unit	100%
1.06 . 1.06.01. 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan	29 orang	18 orang	10 orang	10 orang		9 orang	27 orang	93%
1.06 . 1.06.01. 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	1.984 jenis	1.695 jenis	886 jenis	886 jenis		269 jenis		
1.06 . 1.06.01. 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	1.743 jenis	1.352 jenis	538 jenis	538 jenis		391 jenis		
1.06 . 1.06.01. 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia	92.265 lembar	85.602 lembar	41.005 lembar	41.005 lembar		9.150 lembar		
1.06 . 1.06.01. 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	275 jenis	173 jenis	155 jenis	155 jenis		70 jenis		
<b>1.06 . 1.06.01. 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1.06 . 1.06.01. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.061 liter	4.322 liter						
1.06 . 1.06.01. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	120 unit	67 unit						

1.06 . 1.14.01. 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>								
1.06 . 1.14.01. 15.05	Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH	9.540 KPM	5.370 KPM					
1.06 . 1.14.01. 15.06	Fasilitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan BPNT	5.945 KPM	- KPM					
1.06 . 1.06.01. 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>								
1.06 . 1.06.01. 16.02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban, eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah Orang Terlantar, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Putus Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	45 orang	39 orang					
1.06 . 1.06.01. 16.09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Sosialisasi Mekanisme Pemuktahiran Mandiri di Kecamatan	8 kali	6 kali					
1.06 . 1.06.01. 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>								
1.06 . 1.06.01. 17.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan di kelurahan Desa	6 kegiatan	0 kegiatan					
1.06 . 1.06.01. 18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>								
1.06 . 1.06.01. 18.05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	4 kelurahan	2 kelurahan					
1.06 . 1.06.01. 19	<b>Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo</b>								
1.06 . 1.06.01. 19.03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Jumlah Klien Lanjut Usia Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial	27 orang	20 orang					
1.06 . 1.06.01. 22	<b>Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan</b>								
1.06 . 1.06.01. 22.02	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan	Cakupan Waktu Penyediaan Sarana -Prasarana TMP	36 bulan	24 bulan					

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu (tahun n-2=2020-2=2019) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi kependudukan

Adapun capaian realisasi program administrasi kependudukan dengan indicator ..... sebesar : ..... persen hal ini disebabkan karena .....

Dengan dukungan kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) dengan realisasi ..... Hal ini disebabkan ( permasalahan dan unggulan )

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan

evaluasi capaian target kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum sampai dengan tahun 2019 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial serta data perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS di Kota Tarakan, sehingga menghambat kinerja aparatur dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN 2019–2024	Target SPM	Target IKU	Target Renstra Tahun Ke					Proyeksi					Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial		84%	76%	78%	80%	82%	84%	76%	78%	80%	82%	84%	
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhinya Kebutuhannya		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif		100%	96%	97%	98%	99%	100%	96%	97%	98%	99%	100%	
Nilai LKIP		72/BB	62/B	64/B	66/B	70/B	72/BB	62/B	64/B	66/B	70/B	72/BB	
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		100%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	

**2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala

Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
- b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi.
- b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.

- c. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### 4. Ancaman

- a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;
- b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;
- c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi;
- d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsospm	Jumlah Materai yang Tersedia	300 lembar	1.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinsospm	Jumlah dokumen bermaterai	200 Lembar		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinsospm	Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	118.947.916	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsospm	Waktu penyediaan Jasa Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber	12 bln	10.545.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinsospm	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Pajak Kendaraannya Terbayarkan	22 unit	9.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinsospm	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Pajak Kendaraannya terbayarkan	10 Unit	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinsospm	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan	10 orang	63.386.500	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinsospm	Waktu penyediaan jasa administarsi keuangan	12 bln	50.586.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinsospm	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	300 jenis	25.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinsospm	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan bahan	12 bln	5.000.000	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinsospm	Jumlah ATK yang Tersedia	390 jenis	50.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Dinsospm	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	925 Jenis		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsospm	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia	38.000 lembar	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsospm	Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.086 Jenis	100.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinsospm	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	50 jenis	10.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinsospm	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 Kali	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsospm	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	5 jenis	50.000.000						
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinsospm	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	400 porsi	10.000.000						

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinsospm	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2 OP	15.000.000						
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Dinsospm				
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Dinsospm	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	3.572 liter	65.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Dinsospm	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinsospm	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	3 unit	7.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung	Dinsospm	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Jenis	20.000.000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinsospm	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	40 unit	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung	Dinsospm	Jumlah BBm yang diadakan	1250 liter	25.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Dinsospm	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab	4 unit	200.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinsospm				
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinsospm	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	-	0						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinsospm	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	-	0						
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Dinsospm	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	-	0						
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinsospm	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	0						
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsospm	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen	5.000.000						

<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya</b>										
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsospm	Jumlah Partisipasi PSKS yang Memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam Menunjang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial	64 org	70.000.000						
	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Dinsospm	Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan Sosial	60 klp	80.000.000						
	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinsospm	Jumlah PMKS yang Memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam Kessos	23 org	68.253.048						
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Dinsospm	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH	3.073 KPM	375.872.536						
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Dinsospm	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan BPNT	5.855 KPM	300.000.000						
	Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Dinsospm	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	2.400 org	400.000.000						
<b>VI</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>										
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban, eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Dinsospm	Jumlah Orang Terlantar, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Putus Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan								
	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	Dinsospm	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial								
	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk anak jalanan, anak	Dinsospm	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Bagi Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal								

	cacat dan anak nakal										
	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Dinsospm	Jumlah Rapat Koordinasi Nasional dan Konsultasi Bidang Sosial Penanganan PMKS								
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Dinsospm	Jumlah Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan bagi Anggota Tagana								
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>										
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha										
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat										
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>										
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha										
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>										
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha										





## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2021 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. (DILIHAT USULAN DARI MUSRENBANG ADA ATAU TIDAK)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang Kota. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat dengan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarkan serangkaian kegiatan musrenbang dan forum perangkat daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang di ampu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Tahun 2020 tertuang dalam tabel ..... Di bawah ini.

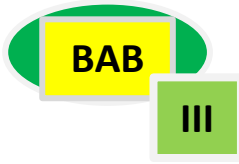
Tabel 2.5.

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN

2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	CATATAN

\*\*\* jika ada usulan musrenbang ya



## TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2021 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021.

### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

#### **3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan dan penyempurnaan kebijakan agar dalam pembangunan selalu mengalami peningkatan capaian kinerja.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana

program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, yang disusun secara *holistik-tematik*, integratif dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 adalah “**Meningkatkan Industri Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk pertumbuhan Berkualitas**”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 72,5
- Tingkat Kemiskinan; 8,5 - 9 persen
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,3 - 5,7persen
- Tingkat Inflasi: 3 ( $\pm$  1)
- Gini Rasio: 0,375 - 0,380
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8 - 5,1
- Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, **Kalimantan 4,08 persen**, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persenPapua 7,18 persen.

Tema pembangunan tersebut menurunkan 7 Prioritas Nasional Tahun 2021 antara lain:

#### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan

- 2) Peningkatan kualitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 3) Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan
- 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- 5) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi
- 6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- 7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri
- 8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

## **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan wilayah Sumatra
- 2) Pengembangan wilayah Jawa Bali
- 3) Pembangunan wilayah Nusa Tenggara
- 4) Pembangunan Wilayah Kalimantan
- 5) Pembangunan Wilayah Sulawesi
- 6) Pembangunan Wilayah Maluku
- 7) Pengembangan Wilayah Papua

## **3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan penguatan tata kelola Kependudukan
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan Sosial
- 3) Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- 5) Peningkatan Kualitas anak, perempuan dan pemuda

- 6) Pengentasan Kemiskinan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

**4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** dengan arah kebijakan yaitu:

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- 2) Peningkatan Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- 3) Memperkuat moderasi beragama
- 4) Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

**5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 2) Infrastruktur Ekonomi
- 3) Infrastruktur Perkotaan
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan
- 5) Transformasi Digital

**6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- 3) Pembangunan rendah karbon

**7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Konsolidasi Demokrasi

- 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri
- 3) Penegakan Hukum Nasional
- 4) Reformasi birokrasi dan Tata Kelola
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
- 6) Reformasi dan Tata Kelola

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ialah “**Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Utara Yang Mandiri, Aman dan Damai**”. Berdasarkan tema tersebut terdapat 5 prioritas daerah yang dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yaitu:

- 1) Pembangunan Manusia
- 2) Pembangunan Ekonomi
- 3) Pembangunan Kewilayahan
- 4) Pembangunan Infrastruktur
- 5) Pembangunan Keamanan, ketertiban, dan Tata kelola Pemerintahan

Prioritas daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 diturunkan kedalam beberapa arah kebijakan yang juga mempedomani prioritas nasional. Adapun beberapa arah kebijakan provinsi yang berkontribusi langsung terhadap Prioritas Nasional (PN) tahun 2021 antara lain:

- 1) PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
  - a. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
  - b. Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi dan IKM
  - c. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
  - d. Peningkatan Daya Tarik Berinvestasi
- 2) PN 2: Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
  - a. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Yang Terintegrasi dengan Tata Ruang

- b. Percepatan Pembangunan Desa Secara Terpadu
- 3) PN 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
  - b. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Kerja
  - c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemandirian PMKS
- 4) PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Yang Terpadu
- 5) PN 5: Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
  - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 6) PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- 7) PN 7: Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Sistem Pelayanan Prima.
  - b. Fasilitas Perwujudan Wilayah Perbatasan Yang Tertib dan Tenram
  - c. Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keamanan dan Kebencanaan terpadu



### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama lima tahun.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan sasaran yang dituju adalah :

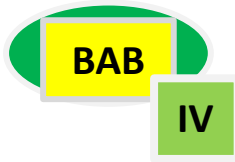
1. Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sebagai berikut :
  - a. Persentase Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk Kaltara;
  - b. Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak ( KIA)
  - c. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil;
  - d. IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sebagai berikut :
  - a. Nilai / Predikat LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - b. Persentase Temuan yang di tindak lanjuti.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Tahun 2020**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	IKM	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang ber e-KTP Kaltara	75 %	80 %	85%	90 %	95 %	100 %
			Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	66 %	70 %	74 %	78 %	83 %	88 %
			Nilai / Predikat IKM	76,91	78,95	79,97	80,99	81,10	82,13
Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	IKM	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang ber e-KTP Kaltara	75 %	80 %	85%	90 %	95 %	100 %
			Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	66 %	70 %	74 %	78 %	83 %	88 %
			Nilai / Predikat IKM	76,91	78,95	79,97	80,99	81,10	82,13





## PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019–2024. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2021. Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 di susun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja merupakan acuan dari setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran merencanakan 4 (Empat) Program diantaranya :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

8. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
10. Program Rehabilitasi Sosial.
11. Program Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perkelurahan.
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.
13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kelurahan.

Dari Program tersebut di atas diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian KORPRI
  - Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya**
- Peningkatan Kemampuan (Capacity Buliding) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
  - Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
  - Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai
  - Sistem Layanan Rujukan Terpadu
- 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban, eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
  - Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
  - Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
  - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
  - Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
  - Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- 8. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan**

- Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

#### **9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
- Sosialisasi Siaga Bencana

#### **10. Program Rehabilitasi Sosial**

- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia
- Rehabilitasi Sosial Anak
- Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

#### **11. Program Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perkelurahan**

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perkelurahan

#### **12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**

- Pemberian Stimulan Pembangunan Kelurahan
- Lomba Teknologi Tepat Guna

#### **13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kelurahan**

- Pelaksanaan Lomba Kelurahan

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam lampiran tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2021**

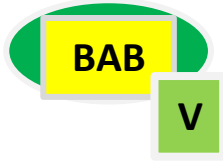
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Target Capaian		Kebutuhan Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/
			Lokasi	Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	Tarakan	400 lbr	2.400.000	APBD Kota	400 lbr	2.400.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	12 bln	210.000.500	APBD Kota	12 bln	251.001.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Pajak Kendaraannya Terbayarkan	Tarakan	22 unit	10.000.000	APBD Kota	22 unit	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan	Tarakan	10 org	64.386.500	APBD Kota	10 org	64.386.500
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Tarakan	320 jenis	26.000.000	APBD Kota	320 jenis	27.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	Tarakan	390 jenis	55.000.000	APBD Kota	390 jenis	60.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pngandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia	Tarakan	38.000 lbr	26.000.000	APBD Kota	38.000 lbr	27.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Tarakan	50 jenis	11.000.000	APBD Kota	50 jenis	12.000.000
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Tarakan	10 jenis	150.000.000	APBD Kota	12 jenis	200.000.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Tarakan	2.000 porsi	50.000.000	APBD Kota	2.000 porsi	50.000.000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tarakan	10 OP	100.000.000	APBD Kota	13 OP	150.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Tarakan	3.870 ltr	65.000.000	APBD Kota	3.870 ltr	65.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Tarakan	3 unit	75.000.000	APBD Kota	3 unit	125.000.000
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Tarakan	40 unit	50.000.000	APBD Kota	40 unit	80.000.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab	Tarakan	4 unit	200.000.000	APBD Kota	4 unit	200.000.000



<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>								
	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	Tarakan	1 bh	15.000.000	APBD Kota	1 bh	15.000.000
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Tarakan	30 org	26.250.000	APBD Kota	30 org	26.250.000
	3	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	Tarakan	30 org	25.000.000	APBD Kota	30 org	25.000.000
	4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tarakan	30 org	42.000.000	APBD Kota	30 org	42.000.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>								
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Tarakan	1 dok	5.000.000	APBD Kota	1 dok	5.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERTINGGAL (KAT) DAN PMKS LAINNYA</b>								
	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Buliding) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Partisipasi PSKS yang Memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam Menunjang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial	Tarakan	44 org	75.000.000	APBD Kota	60 klp	80.000.000
	2	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan Sosial	Tarakan	60 klp	80.000.000	APBD Kota	25 org	70.000.000
	3	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam Kessos	Tarakan	25 org	70.000.000	APBD Kota	3.073 KPM	230.000.000
	4	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH	Tarakan	3.073 KPM	200.000.000	APBD Kota	5.855 KPM	700.000.000
	5	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan BPNT	Tarakan	8.727KPM	700.000.000	APBD Kota	9.043 KPM	300.000.000
	6	Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Tarakan	2.500 org	300.000.000	APBD Kota	1.500 Org	150.000.000
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>								
	1	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi Korban, eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah Orang Terlantar, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Putus Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	Tarakan	120 org	175.000.000	APBD Kota	150 org	255.000.000
	2	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial	Tarakan	300 org	175.000.000	APBD Kota	200 org	150.000.000
	3	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Bagi Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	Tarakan	15 org	50.000.000	APBD Kota	50 org	150.000.000
	4	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi	Jumlah Rapat Koordinasi Nasional dan	Tarakan	12 kali	100.000.000	APBD Kota	12 kali	120.000.000

		Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Konsultasi Bidang Sosial Penanganan PMKS						
	5	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan bagi Anggota Tagana	Tarakan	35 org	150.000.000	APBD Kota	35 org	150.000.000
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>								
	1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Peserta Pelatihan	Tarakan	30 org	80.000.000	APBD Kota	30 org	80.000.000
	2	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan TKS, TKSK, TAGANA, LK3 dan Relawan Sosial	Tarakan	20 org	250.000.000	APBD Kota	20 org	250.000.000
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN</b>								
	1	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan	Cakupan Waktu Penyediaan Sarana Prasarana TMP	Tarakan	12 bln	150.000.000	APBD Kota	12 bln	250.000.000
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>								
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	Tarakan	100%	350.000.000	APBD Kota	100%	350.000.000
	2	Sosialisasi Siaga Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Kampung Siaga Bencana di Kelurahan & Sekolah	Tarakan	100 org	200.000.000	APBD Kota	100 org	200.000.000
<b>X</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>								
	1	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Tarakan	100%	105.000.000	APBD Kota	100%	109.000.000
	2	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	Persentase Penyandang Lansia Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Tarakan	100%	100.000.000	APBD Kota	100%	100.000.000
	3	Rehabilitasi Sosial Anak	Persentase Anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Tarakan	100%	80.000.000	APBD Kota	100%	105.000.000
	4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yg Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Tarakan	100%	80.000.000	APBD Kota	100%	105.000.000
<b>XI</b>	<b>PROGRAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERKELURAHAN</b>								
	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pekelurahan	Jumlah Lembaga/ Organisasi Masyarakat yang dibina	Tarakan	228 Lbg Masy	230.050.000	APBD Kota	248 Lbg Masy	246.153.500

<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN</b>								
	1	Pemberian Stimulan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Posyandu yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya	Tarakan	0	-	APBD Kota	0	-
	2	Lomba Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG yang dilombakan	Tarakan	4 alat	175.000.000	APBD Kota	4 alat	175.000.000
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN</b>								
	1	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	Tarakan	8 Kel	150.000.000	APBD Kota	16 Kel	165.000.000
<b>J U M L A H</b>						<b>5.233.087.000</b>			<b>5.802.191.000</b>



## PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi Kepala Daerah Periode 2019-2024 yaitu **"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City"**.

Tarakan, Maret 2022  
Kepala Dinas Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat 



ARBAJIN, SE. M.AP.  
NIP. 19680318 199403 1 007